

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1981, didirikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang. Alasan didirikannya karena kemajuan pembangunan yang sangat pesat di Kota ini. Hal ini menimbulkan dampak atau efek samping yang memunculkan bentuk tindakan kriminal. Efek dari kemajuan pembangunan tersebut salah satunya yakni munculnya pemikiran bagaimana cara untuk bisa bekerja sedangkan latarbelakang pendidikan mereka rendah, maka dari itu masyarakat mulai berfikir untuk menggunakan cara yang tidak baik seperti menyogok dan lainnya. Perbuatan tersebut tentu saja karena adanya kerjasama antara individu yang ingin mencari kerja dengan salah seorang pekerja di suatu perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan lebih. Adapun masalah lain yang timbul yakni karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan masyarakat yang memiliki riwayat pendidikan tinggi, sedangkan pada umumnya masyarakat Kota Karawang saat itu berpendidikan rendah. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk bekerja secara instan walaupun pekerjaan tersebut bersifat negatif seperti mencuri, menipu, bahkan menjual obat-obatan terlarang. Hal ini terjadi akibat pergeseran nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga Kabupaten Karawang membutuhkan institusi untuk menampung pelanggar hukum.

Lembaga Pemasyarakatan berdiri untuk menghapus sistem kepenjaraan di masa lalu yang dianggap memberi siksaan kepada Narapidana. Narapidana adalah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana (Tim Prima Pena, 2006 : 331). Dengan kata lain, narapidana merupakan orang yang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya menurut perundang-undangan. Sistem kepenjaraan memunculkan persepsi atau

anggapan negatif bagi masyarakat. Masyarakat membayangkan bahwa ketika Napi berada di penjara, ia diperlakukan dengan menggunakan tindakan kekerasan, tidak diberikan fasilitas yang nyaman, dan kegiatan Napi sehari-hari hanya berdiam diri atau dikurung di dalam sel selama 24 jam. Anggapan-anggapan tersebut muncul dari mulut ke mulut, atau misalnya melalui mantan Napi yang sudah berbaur dengan masyarakat yang kemudian menceritakan pengalamannya ketika di dalam Lapas.

Setelah berdirinya Lapas, masyarakat lambat-laun berubah pemikirannya mengenai bagaimana kehidupan Napi di dalam penjara. Ketika di dalam lingkungan Lapas, Napi justru merasakan perlakuan baik dan sikap petugas yang tegas dalam berperilaku. Hal ini sesuai dengan tujuan Lapas yakni mengayomi Napi, bukan menyiksa Napi. Karena intinya, Napi memang di kurung di dalam Penjara, tetapi lebih tepatnya, ia dibatasi dan diawasi dalam hal berperilaku, beribadah, dan bahkan pengawasan juga dilakukan ketika pertemuan Napi dengan keluarga. Bukan tidak mungkin bahwa Napi mengeluh dengan keadaan bahwa ia harus selalu mengikuti apapun kegiatan di dalam Lapas, walaupun sebenarnya terdapat hak-hak Napi ketika menjalani masa kurungannya yakni seperti tercantum dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2003 : 247) diantaranya :

- a. Mendapatkan perawatan baik rohani maupun jasmani.
- b. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- d. Mampu menyampaikan keluhan.
- e. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
- f. Mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.
- g. Menerima kunjungan keluarga.
- h. Penasehat hukum, dan lain-lain.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang terdapat Program Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Peneliti berusaha memfokuskan penelitian mengenai Pembinaan Keagamaan yang termasuk kepada Pembinaan Kepribadian. Pembinaan Keagamaan yang diteliti seperti TPA (Taman Pendidikan Al-Quran), Pendidikan Shalat Wajib dan Shalat Sunnah, Pesantren Ramadhan dan Tadarus, Nasyid dan Qasidah, Pembacaan Shalawat Nabi, Pengajian Rutin Mingguan dan Dakwah, dan Perlombaan di hari-hari besar seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Perlombaan Adzan, dan Perlombaan Busana Muslim. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil Narapidana kasus Narkoba sebagai sampel penelitian yang dikarenakan di Lapas ini, jumlah Napi terbanyak adalah Napi Narkoba 501 jiwa dari 1102 jiwa. Pada intinya, membicarakan mengenai pembinaan di Lapas tentu erat kaitannya dengan petugas Lapas, karena pembinaan dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerjasama antara Napi dan Petugas. Tugas pegawai Lapas yakni membimbing Napi serta menjaga ketertiban lingkungan Lapas adalah pekerjaan yang tidak mudah dilakukan karena dibutuhkan kepercayaan dan tanggungjawab yang besar.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang saat ini, dilihat dari segi kapasitas ideal isi Lapas adalah 590 jiwa, sedangkan pada Tahun 2014 ini jumlah keseluruhannya mencapai 1102 jiwa dan jumlah Narapidana Narkoba adalah 501 jiwa. Dengan kata lain, jumlah narapidana melebihi batas kapasitas yang tersedia. Pembagian blok tergantung kepada kasusnya, artinya berbeda kasus tindak kejahatan, berbeda pula blok nya. Satu blok terdiri dari enam kamar yang satu kamar berukuran besar kurang lebih dihuni oleh sembilan sampai lima belas orang, sedangkan kamar berukuran kecil berisi hanya tiga orang. Adapun interaksi yang terjadi antara narapidana kasus yang satu dengan yang lainnya yakni ketika kegiatan-kegiatan pembinaan berlangsung seperti senam pagi, acara keagamaan, upacara, dan hari-hari besar lainnya.

1. 2. Identifikasi Masalah

Adapun masalah yang teridentifikasi salah satunya mengenai program pembinaan di Lapas. Pelaksanaan program pembinaan di Lapas dinilai kurang efektif karena peraturan dalam pembinaan keagamaan tidak terlaksana seperti ketika Napi tidak mengikuti pembinaan keagamaan berupa pengajian selama tiga kali berturut-turut, seharusnya Napi mendapat sanksi tidak mendapat remisi. Tetapi pada kenyataannya, ketika pelaksanaan pengajian berlangsung, terlihat ada seorang Napi yang sedang merokok duduk di halaman masjid. Petugas yang melihat kejadian tersebut hanya menegurnya untuk kembali ke dalam Masjid. Bukannya mengikuti perkataan petugas, Napi tersebut malah tersenyum tidak menghiraukan petugas lalu melanjutkan untuk merokok di halaman masjid. Kedua, masalah yang teridentifikasi yakni mengenai manfaat yang dirasakan Napi dengan mengikuti pembinaan keagamaan di Lapas Kelas II A Karawang. Manfaat pembinaan keagamaan yang dirasakan Napi yakni berupa perubahan perilaku dari Napi tersebut seperti rajin beribadah, rajin mengikuti pengajian, tidak bermasalah dengan petugas ataupun dengan individu yang lain. Terakhir, masalah yang teridentifikasi yakni mengenai peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan terlihat dari ketatnya pengawasan petugas. Penjagaan secara umum sama seperti pada umumnya, yakni ketika ada orang luar yang berkunjung ke Lapas, orang tersebut harus mengikuti peraturan yang ada seperti tidak di perkenankan untuk membawa *camera*, *handphone*, *tape recorder*, dan lain-lain. Petugas dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan berupa kegiatan pengajian berjumlah enam orang, satu petugas khusus diandalkan dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan, beliau mengawasi dan mengatur dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan. Sedangkan lima petugas lain mengawasi lingkungan sekitar masjid ketika kegiatan berlangsung. Peranan Lapas dianggap belum tegas ketika ada Napi yang tidak mengikuti kegiatan Pembinaan keagamaan yang hanya mendapati teguran saja, padahal Napi tersebut sudah tiga kali tidak mengikuti pengajian. Kurangnya jumlah pembina atau Ustad dalam pelaksanaan pengajian tersebut.

1. 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Program Pembinaan Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang?
2. Bagaimana Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang dalam Pembinaan Keagamaan?
3. Apa Manfaat Pembinaan Keagamaan terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang?

1. 4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Program Pembinaan Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang.
2. Untuk Mengetahui Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang dalam Pembinaan Keagamaan.
3. Untuk mengetahui Manfaat Pembinaan Keagamaan terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang.

1. 5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan dan wawasan mengenai hukum-hukum Narkoba dan bahaya Narkoba. Dan juga mengetahui informasi seputar Lapas seperti tujuan didirikannya Lapas, program-program pembinaan yang terdapat di Lapas, Peranannya, Manfaat Pembinaan di Lapas dan adanya kerjasama pelaksanaan pembinaan-pembinaan di Lapas tersebut dengan pihak luar.

2. Kegunaan Praktis

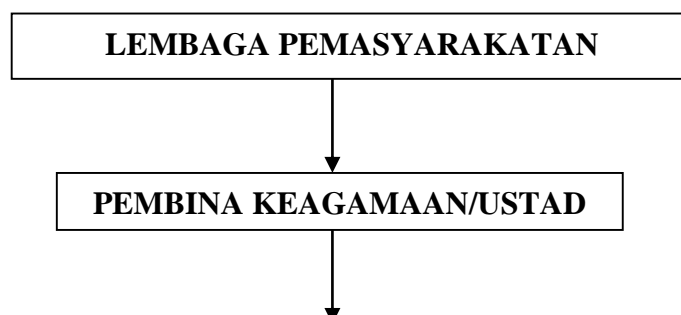
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti sendiri bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sebuah wadah untuk membimbing dan mengayomi narapidana. Selain itu, penelitian ini bisa memberi masukan kepada Narapidana maupun petugas Lapas dalam efektifitas pelaksanaan kegiatan Pembinaan Keagamaan dan juga berperan penting dalam perubahan Narapidana terutama dalam hal perilaku Keagamaan untuk menjadi individu yang lebih baik.

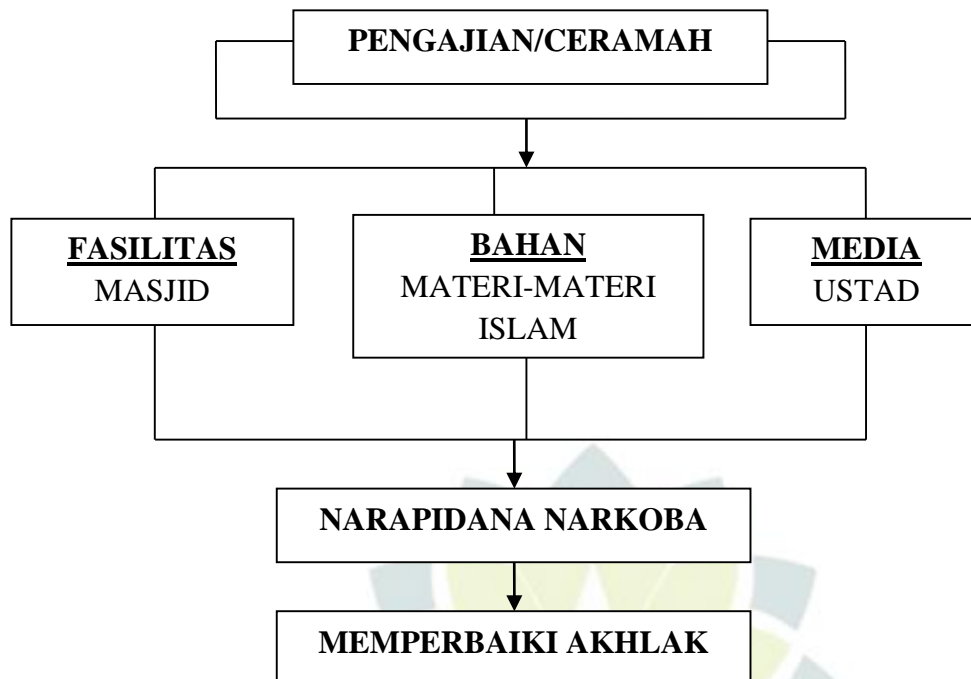


1. 6. Kerangka Pemikiran

Skema Kerangka Berfikir

Penelitian Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Keagamaan





Dalam penelitian ini, pembinaan keagamaan dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut terdiri dari tujuan, sasaran, metode, media, fasilitas, bahan, dan pelaksana. Masing-masing komponen itu menempati kedudukan dan fungsi tertentu dalam seluruh kesatuan sistem. Komponen di dalam sistem itu adalah Lembaga Pemasyarakatan, Petugas Pembinaan Keagamaan, Ustad, dan Narapidana Narkoba. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana efektifitas peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang dalam perubahan yang terjadi pada Narapidana Narkoba.

Teori dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional. Sebagai kerangka acuan penelitian empiris, teori fungsional memandang masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang seimbang. Manusia menjalankan kegiatannya menurut norma yang berlaku umum, peranan serta statusnya. Struktural fungsional sering menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Dengan kata lain bahwa fungsionalisme struktural terdiri dari bagian yang sesuai, rapi, teratur, dan saling bergantung. Seperti layaknya sebuah sistem, maka

struktur yang terdapat di masyarakat akan memiliki kemungkinan untuk berubah. Begitupula pada masyarakat Lapas, narapidana akan mengikuti semua peraturan yang terstruktur dari sebuah Lembaga yakni Lembaga Pemasyarakatan. Karena Lembaga tersebut merupakan wadah untuk mengayomi narapidana agar berubah menjadi individu yang lebih baik dari segi sifat, sikap, dan lainnya.

Talcott Parsons melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Dalam teorinya, Parsons menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup (Dwi Susilo, Rahmat K, 2008:107). Komponen utama pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons berpendapat bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan. Asumsi dasar dari teori Fungsionalisme Struktural yakni masyarakat menjadi suatu kesatuan atas dasar kesepakatan dari para anggotanya terhadap nilai-nilai tertentu yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian, masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling memiliki ketergantungan.

Dalam teori struktural fungsional Parsons ini, terdapat empat fungsi untuk semua sistem tindakan. Suatu fungsi adalah kumpulan hal yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Secara sederhana, fungsionalisme struktural adalah sebuah teori yang pemahamannya tentang masyarakat yang didasarkan pada model sistem organik dalam ilmu biologi. Artinya, fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari

beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Satu bagian tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan. Dengan demikian, dalam perspektif fungsionalisme ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa bertahan. Parsons kemudian mengembangkan apa yang dikenal sebagai imperatif-imperatif fungsional agar sebuah sistem bisa bertahan. Imperatif-imperatif tersebut adalah Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Latensi atau yang biasa disingkat AGIL : Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency ((Dwi Susilo, Rahmat K, 2008: 121).

1. *Adaptation* : sebuah sistem ibarat makhluk hidup. Artinya, agar dapat terus berlangsung hidup, sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada atau dengan kata lain harus mampu bertahan ketika situasi eksternal sedang tidak mendukung.
2. *Goal* (Pencapaian) : sebuah sistem harus memiliki suatu arah yang jelas dapat berusaha mencapai tujuan utamanya. Dalam hal ini, sistem harus dapat mengatur, menentukan dan memiliki sumberdaya untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang bersifat kolektif.
3. *Integration* : sebuah sistem harus mengatur hubungan antarbagian yang menjadi komponennya.
4. *Latency* : Pemeliharaan pola, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Kesimpulannya, struktural fungsional membahas mengenai sebuah sistem yang saling berkaitan. Sistem disini dengan kata lain merupakan hubungan yang sangat berkaitan yakni Lembaga Pemasyarakatan dengan WBP atau Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk membimbing, mengayomi, dan memperbaiki individu WBP dengan melalui adaptasi terlebih dahulu ketika WBP menjalani masa tahanan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan di dalam Lapas. Adaptasi dibutuhkan agar baik WBP maupun Petugas

terbiasa dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan. Terdapat pula peraturan-peraturan ataupun kegiatan yang harus dilaksanakan oleh WBP yang diawasi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tentu saja memiliki *Goal* (pencapaian) yakni agar WBP merasa tersadar dengan kesalahan yang diperbuat. Hal ini terasa ketika mereka mengikuti kegiatan pembinaan, khususnya pembinaan kesadaran beragama berupa kegiatan pengajian dan ceramah rutin. Dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ini seiring dengan berjalannya waktu, terlihat adanya integrasi antara petugas/pembina Lembaga Pemasyarakatan dengan WBP sendiri. Hal ini terlihat ketika pelaksanaan Pengajian, ketika Ustad menjelaskan materi ceramah, para tahanan senantiasa mendengarkan dan menyimak dengan baik. WBP terlihat menghargai dan memang membutuhkan motivasi agar tersadar dengan kesalahan dan selalu mengingat Allah SWT. Adapun mengenai *Latency*, pemeliharaan pola agar pembinaan didalam Lapas selalu *kondusif*. Dengan kata lain, fungsi Lapas sebagai lembaga yang mewadahi orang-orang yang melakukan kesalahan agar bisa memperbaiki diri dapat tercapai dan sistem yang semakin lama semakin maju.

